BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah satu hal yang penting dan banyak diimpikan setiap manusia. Dalam ajaran Islam, menikah salah satu ibadah yang dianjurkan.²⁷ Karena dengan menikah seseorang akan membina rumah tangga dan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Menjalin *silaturahmi* dengan keluarga dan memiliki keturunan, selain itu juga menghindari zina. Dalam Islam, zina adalah haram maka diperintahkan untuk menikah bagi yang mampu dan berpuasa bagi yang belum mampu. Dalam agama Islam, pernikahan juga diatur dengan baik. Di mana memiliki dasar hukum pernikahan.²⁸ Sementara pernikahan menurut Islam, di mana dasar hukum pernikahan dasar hukum pernikahan dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Sementara itu ulama dari kalangan *Shāfi'iyah* mendefinisikan nikah dengan akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah/kawin atau yang memiliki makna yang sama dengan nikah/kawin.²⁹

Dalam Al-Quran Juga di perintahkan agar manusia hidup berpasang-pasangan seperti pada Surat Ar-Rum Ayat 21.

²⁷ Akhmad Kamil Rizani., *Studi Komparatif Putusan Pengadilan Negeri Magelang Dengan Pengadilan Negeri Blora Tentang Kontradiktif Pencatatan Perkawinan Beda Agama*, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2018, 36

²⁸ <https://waluyorejo.kec-puring.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/148/143>.

وَمِنَّا لِيهَا خَلْقٌ لَكُمْ مِمَّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّفِيذَ لِكَا لَاتِهِ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³⁰

Dan di dalam Hadist Rasulullah SAW

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْزُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji(kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

Dalam Undang-Undang juga di jelaskan kususnya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bercampurnya atau berkumpulnya dua orang (Laki-laki dan Perempuan) yang bukan mahram dalam ikatan akad (perjanjian) untuk kemudian di perbolehkan melakukan hubungan seksual. Di dalam Pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

³⁰Dikutip dari Al-Quran NU online, pada 20 Agustus 2024 <https://quran.nu.or.id/ar-rum/23>

Tentang Perkawinan Pasal (2) Ayat (1) adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan bahwa didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqanghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Tentang Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 5 (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut ada pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.³²

Tujuan perkawinan

Secara umum tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia (pria terhadap wanita atau sebaliknya) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-

³¹ Dikutip dari Peraturan.bpk.go.id <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-o-1tahun-1974>

³² Himpunan Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan kompilasi Hukum Islam serta pengertian dalam pembahasannya, Makamah Agung RI 2011

ketentuan agama Islam. Secara umum tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Untuk mendapatkan kebahagiaan dan kenyamanan hidup (sakinah).

Ketentraman adalah idaman setia porang. Nikah adalah suatu cara supaya hidup menjadi tenang dan Bahagia. Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهَا خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir³³.

b) Untuk memelihara kecintaan dan kasih kepada pasangan. Nikah merupakan suatu upaya untuk membangun rasa sayang antara suami, istri, dan anak. (Q.S.Ar-Rum/30:21)

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.³⁴

c) Untuk menyalurkan kebutuhan lahir dan batin yang sah dan diridhai Allah Swt.

d) Untuk melaksanakan Perintah Allah Swt. Menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah Swt. Oleh karena itu menikah akan dicatat sebagai ibadah. Allah Swt berfirman:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ بَلَّكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

³³Dikutip dari Al-Quran NU online, Pada 20 Agustus 2024, <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>

³⁴ *Ibid*

“Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai (Q.S.An-Nisa’/4:3)”

e) Untuk menjalankan sunah Rasulullah dalam hadist nya :

“Nikah itu adalah sunahku, barang siapa tidak senang dengan sunahku, maka bukan golonganku». (HR. Bukhori dan Muslim)

Rukun dan Syarat Perkawinan

Sah atau tidak nya suatu pernikahan bergantung kepada terpenuhi atau tidak nya rukun serta syarat nikah. (lihat tabel)

RUKUN	SYARAT
CALON SUAMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beragama islam 2. Atas kemauan sendiri 3. Bukan muhrim 4. Tidak sedang ihrom haji
CALON ISTRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beragama Islam 2. Tidak terpaksa 3. Bukan muhrim 4. Tidak bersuami 5. Tidak sedang dalam masa idah 6. Tidak sedang ihrom haji atau umroh
ADANYA WALI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mukallaf (Islam, Dewasa, Sehat akal) 2. Laki-Laki merdeka 3. Adil 4. Tidak sedang uhrom haji atau umroh
ADANYA DUA ORANG SAKSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Islam 2. Dewasa 3. Sehat akal 4. Tidak fasik 5. Hadir dalam akad nikah
ADANYA IJAB DAN QABUL	Dengan kata-kata “ nikah “ atau yang semakna dengan itu. Berurutan antara Ijab dan <i>Qabul</i>

Keterangan :

1. Wali Nikah :

Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah³⁵. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Wali nikah di bagi menjadi dua yaitu wali Nasab dan wali Hakim :

2. Wali Nasab :

Yaitu yang mempunyai keturunan darah dari mempelai Wanita atau pihak Perempuan antara lain

- a. Ayah kandung, (ayah tiri tidak sah jadi wali)
- b. Kakek (ayah dari ayah mempelai perempuan) dan seterusnya keatas
- c. Saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- g. Saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah
- i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah

³⁵ syarifuddin amir ,*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta :Prenada Media Grup, 2009) ,hlm 69

3. Wali Hakim

Yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Islam yang berada disetiap kecamatan. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah apa bila memenuhi kondisi sebagai berikut.

- a. Wali nasab benar-benar tidak ada.
- b. Wali yang lebih dekat (*aqrab*) tidak memenuhi syarat dan wali yang lebih jauh (*ab'ad*) tidak ada.
- c. Wali aqrab bepergian jauh dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab urutan berikutnya untuk bertindak sebagai wali nikah.
- d. Wali nasab sedang berikhram haji atau umroh.
- e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah.
- f. Wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak dapat bertindak sebagai wali nikah.
- g. Wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya

4. Saksi Nikah

Saksi dalam bahasa arab disebut *sha>hida*. Sebagaimana dalam *Mu'jamal-Wasith*, kata *sha>hid* merupakan bentuk *isim Fa'il* dari kata *shahida* yang berarti“ yang melihat sesuatu secara sempuran dan jelas³⁶ Dalam kamus bahasa Indonesia kata saksi berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian); atau orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat

³⁶ Aurel Thessalonica Saragih., *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal*, (Studi Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tjk), Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023, hlm 19

memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.³⁷

B. Poligami

1. Poligami menurut hukum Islam

Poligami adalah suatu praktik pernikahan lebih dari satu istri. . Perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada lebih dari satu wanita merupakan pemahaman umum tentang poligami, dengan arti bahwa seorang laki-laki dalam keluarga harus bisa membagi cinta dan kasih sayangnya kepada istri-istri yang dinikahi, dan hal ini mampu mengundang tanggapan positif dan negatif orang lain terhadap moral yang dimiliki oleh pelaku poligami.³⁸

Konsep poligami (*ta'addud al-zaujāt*) dalam ilmu fikih secara umum dipahami sebagai seorang suami dalam waktu bersamaan yang mengumpulkan dua sampai empat istri. Poligami tidak dapat diketahui secara pasti awalmula kemunculannya. Sejak ribuan tahun silam, sebelum datang Islam poligami sudah menjadi tradisi yang dianggap wajar.³⁹

Adapun dasar rujukan di perbolehkannya poligami terdapat pada surat QS.al-Nisā/4:3

وَأَنْخِفْتُمْ مَا لَا تَنْفُسُ طُوفَا لِيَتَمَسَّكُمْ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنْ سَوَّاهُنَّ لَكُمْ وَأَنْخِفْتُمْ مَا لَا تَعْدِلُونَ

وَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكُمْ كَذُنَّ لَنَا لَا تَعُولُونَ

³⁷ Setiawan, Ebta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, KBBI offline Versi 1.1 2010 dengan mengacu pada data KBBI Daring (edisi III) diambil dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/> (Database hak cipta Pusat Bahasa).

³⁸ Muhammad Yahya, *Poligami Dalam Perspektif Nabi*, hlm.3.

³⁹ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT. Gramedia, 2014), hlm. 126.

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.⁴⁰

Negara Indonesia sebagai negara hukum, terdapat peraturan yang mengatur mengenai beristri lebih dari satu orang. peraturan tersendiri mengenai perkawinan, yang tertuang dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 3 (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 undang-undang tersebut secara jelas bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yang diperuntukkan bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Akan tetapi, dalam undang-undang ini pula terdapat pengecualian, seorang suami bisa beristri lebih dari satu orang apabila ada izin dari pihak yang bersangkutan, dalam hal ini istri terdahulu. Adanya pengecualian ini berlandaskan pada agama yang tidak mengharamkan praktik poligami.⁴¹

Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia yang tidak serata merta memperbolehkan praktik poligami, kecuali alasan atau dalil-dalil. Sehingga tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh, sejalan dengan ajaran Islam yang memberikan syarat ketat terhadap calon pelaku poligami. Oleh karena itu, jika syarat-syarat yang ditentukan telah terpenuhi maka pelaku poligami tidak akan mengalami kesulitan dalam berumah tangga akibat dari tuntutan istri-istrinya.⁴²

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

⁴⁰ Al-Qur'an Surat An-nisa' Ayat : 3

⁴¹ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*

⁴² Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, h.120-121.

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga secara tegas tdiak memperbolehkan poligami kecuali jika pihak yang bersangkutan memberikan izin persetujuan. ⁴³Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55 dinyatakan bahwa laki-laki bisa beristri lebih dari satu orang sampai empat orang dengan syarat suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dan apabila syarat tersebut dikhawatirkan tidak terpenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu.

C. Izin Poligami

Pelaksanaan poligami di indonesia kerap kali terjadi, sehingga banyak masyarakat yang melakukan poligami baik secara tertulis atau tidak tertulis. Dalam undang-undang sendiri memberikan syarat kepada pelaku poligami yaitu khususnya pada Pasal 3 Undang-Undang Tentang Perkawinan Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendai oleh pihak yang bersangkutan.⁴⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 Ayat 1 menyatakan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang hendak mendapatkan izin dari pengadilan.

45

Agar dapat melakukan poligami secara sah menurut hukum di Indonesia, maka poligami tersebut harus memenuhi syarat poligami sebagai berikut:

1. Suami wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dengan syarat:

⁴³Muhammad Yahya, Poligami Dalam Perspektif Nabisaw,h.246

⁴⁴ Iman Firmansyah., *Perkawinan Dalam Pandangan Agama Islam dan Buddha (Sebuah Studi Perbandingan) Program Studi Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin*, Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 44

⁴⁵ Undang-Undang Perkawinan Pasal 3

⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 Ayat 1

- a. Ada persetujuan dari istri/istri-istri, dengan catatan persetujuan ini tidak diperlukan jika:
 1. Istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian'
 2. Tidak ada kabar dari istri selama minimal 2 tahun; atau
 3. Karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.
 - b. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.
2. Pengadilan hanya memberikan izin poligami jika:
- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Izin tersebut diberikan pengadilan jika berpendapat adanya cukup alasan bagi pemohon (suami) untuk beristri lebih dari seorang.